



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2015-2016 digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah berdasarkan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Hasil analisa kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan. Hal ini bertujuan agar arah pembangunan daerah tahun 2016 dapat dicapai sesuai dengan peluang dan tantangan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2013-2018. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2016. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2016 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun dan mengembangkan sentra-sentra industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk unggulan daerah dengan memperhatikan keterkaitan proses produksi dari hulu ke hilir dan keterkaitan antar wilayah. Untuk itu diperlukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung daya saing ekonomi daerah dan percepatan transformasi struktur ekonomi. Cakupan percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk



meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi masyarakat.

2. Meningkatkan arus investasi ke daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak *multiplier effect* yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
3. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
4. Mendorong percepatan pengembangan kawasan- kawasan strategis provinsi seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial yang meliputi:
 - 1) Kawasan Industri Kariangau Dan Buluminung, Balikpapan dan PPU;
 - 2) Kawasan Perkayuan, Perkapalan, Industri Dan Jasa, Kota Samarinda;



- 3) Kawasan Industri Berbasis Migas dan Kondensat, Bontang;
 - 4) Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kutim;
 - 5) Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan Berau;
 - 6) Kawasan Industri Pertanian, Kab Paser dan PPU;
 - 7) Kawasan Industri Pertanian, Kukar dan Kubar;
 - 8) Kawasan Strategis Perbatasan Mahakam Ulu
5. Menjaga kestabilan tingkat inflasi di daerah dengan menjaga ketersediaan pangan yang merupakan kelompok komoditi yang paling memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi di daerah. Untuk itu dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pencetakan sawah baru, optimasi lahan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
6. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana yang diharapkan pada Visi Kaltim 2030, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping juga ke arah pemerataan pendapatan. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (tujuh belas) lapangan usaha sesuai kategori PDRB baru yang dirilis BPS, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sektor pertanian, kehutanan & perikanan;
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian;
- 3) Sektor industri pengolahan;
- 4) Sektor pengadaan listrik, gas ;
- 5) Sektor pengadaan air;
- 6) Sektor konstruksi;
- 7) Sektor perdagangan besar & eceran, Reparasi mobil & sepeda motor;
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan;



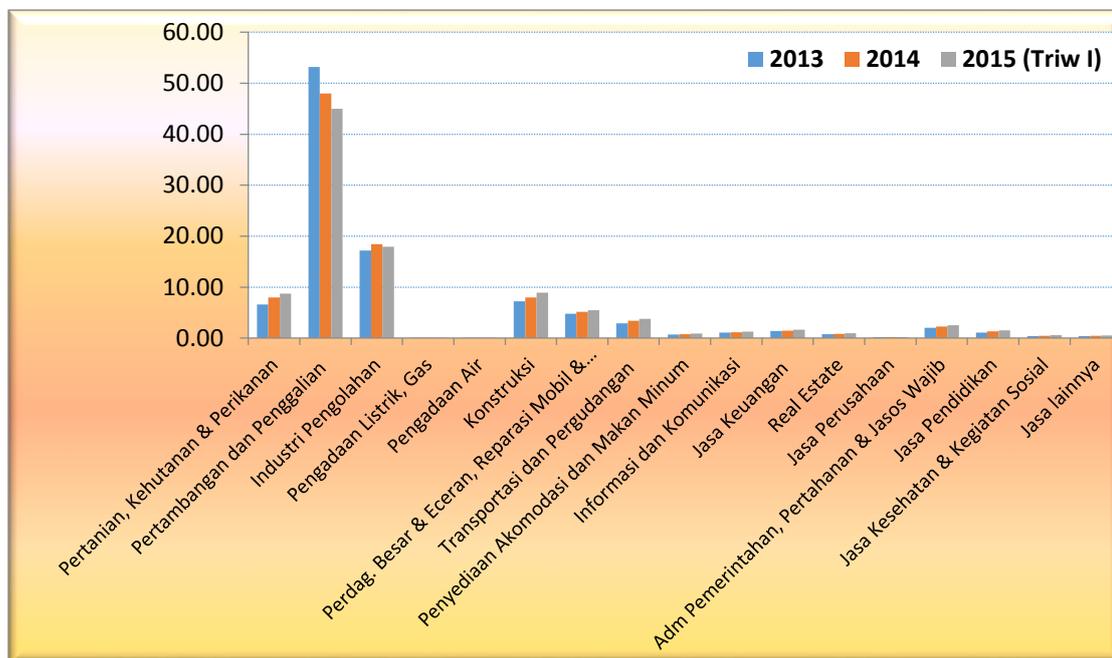
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- 10) Sektor informasi dan komunikasi ;
- 11) Sektor jasa keuangan ;
- 12) Sektor real estate ;
- 13) Sektor jasa perusahaan ;
- 14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ;
- 15) Sektor jasa pendidikan ;
- 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial ;
- 17) Sektor jasa lainnya

a) Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan struktur ekonomi pada tahun sebelumnya dimana pertambangan dan penggalian utamanya sumber daya alam yang tak terbaharui menjadi sektor yang mendominasi pembentukan struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (47,98%). Sektor dominan dalam struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang kedua adalah industri pengolahan yang mencapai 18,45 persen kontribusinya dalam pembentukan perekonomian.

Meskipun sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi perekonomian Kaltim, akan tetapi peranannya dalam beberapa tahun ini terus tergerus. Sebelumnya pada tahun 2013 peranan sektor tersebut masih 53,18 persen, berkurang 5,20 poin setahun kemudian. Pada tahun 2014 peranan sektor pertambangan dan penggalian merosot sebesar 6,35 % dari tahun 2013. Seiring dengan itu, peranan sektor pertanian mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 peranannya meningkat sebesar 10,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadi indikasi bahwa *switching* dari Pertambangan ke Pertanian sudah mulai berjalan. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian, anjloknya kinerja sektor pertambangan cukup dalam sehingga sangat terasa bagi perekonomian Kaltim pada tahun 2015 seperti gambar 3.1.

Gambar 3.1
Grafik Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013, 2014 dan Triwulan I Tahun 2015



Sumber: BPS Kaltim (Data termasuk Kaltara)

Berdasarkan data distribusi PDRB menurut tiga kelompok sektor yakni kelompok sektor primer (pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian), Kelompok sektor sekunder (industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, sektor pengadaan air, dan sektor konstruksi), dan kelompok sektor tersier (sebelas sektor lain), Seperti tabel 3.1.

Tabel 3.1
Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015

No	Kelompok	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Primer	61,01	61,48	59,80	55,94	53,68
	Non Pertamb. Migas dan Batubara	8,95	9,27	9,55	11,13	12,31
	Pertamb. Migas dan Batubara	52,06	52,21	50,25	44,81	41,37
2	Sekunder	24,99	23,76	24,44	26,52	26,92
	Non Industri Batubara dan Migas	11,76	12,72	13,55	14,68	16,35
	Industri Batubara dan Migas	13,23	11,04	10,89	11,84	10,57
3	Tersier	14,00	14,76	15,76	17,54	19,40
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Termasuk Kaltara)

* Angka triwulan I/2015



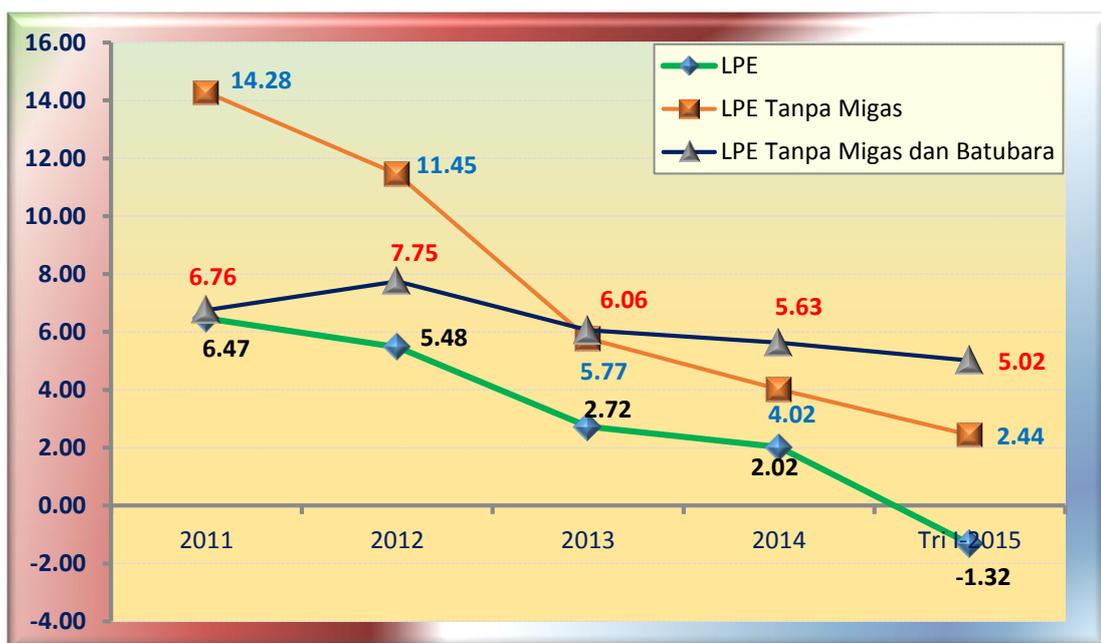
Dalam lima tahun terakhir kontribusi kelompok tersier mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kelesuan disektor pertambangan migas dan batubara. Sementara itu, pada sektor non pertambangan migas dan batubara justru meningkat dari 8,95 persen ditahun 2011 menjadi 11,13 persen pada tahun 2014. Sejalan dengan itu, sektor non industri batubara dan migas kelompok sekunder serta sektor tersier juga mengalami peningkatan kontribusi dalam perekonomian Kaltim.

b) Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5,48 persen dimana pada tahun sebelumnya mencapai 6,47 persen. Perlambatan terus terjadi hingga pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 2,02 persen.

Melemahnya produktivitas komoditas tersebut membuat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami perlambatan. Ketika kedua komoditas tersebut di keluarkan, ternyata ekonomi Kaltim mampu tumbuh di atas 5 persen per tahun selama periode 2011 – 2014. Pada triwulan I/2015 pertumbuhan ekonomi -1,32 persen lebih rendah dibanding posisi yang sama ditahun 2014 yaitu 0,66 persen seperti gambar 3.2.

Gambar 3.2
Grafik Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 (Triwulan I)



Sumber: BPS Prov. Kaltim
*Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara



Penurunan ekonomi Kaltim pada triwulan I-2015 hingga di bawah nol persen disebabkan melemahnya batubara dan migas. Harga batubara yang belum juga membaik hingga triwulan I/2015 membuat geliat produksi batubara terganggu. Banyak perusahaan yang mengerem produksinya sehingga membuat pertumbuhan sektor pertambangan komoditas batubara turun. Demikian juga dengan migas yang pada triwulan I/2015 juga anjlok pertumbuhannya.

Melemahnya perekonomian Kaltim akibat lesunya pertambangan batubara dan migas akan memberikan dampak pada keuangan daerah secara langsung terutama terkait Dana Bagi Hasil, dan dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Ditengah situasi perlambatan ekonomi, sektor non migas dan batubara seperti pertanian, perdagangan, konstruksi dan lainnya masih mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat pada Triwulan I/2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tanpa migas dan batubara mencapai 5,02 persen. Situasi seperti ini sudah sejalan dengan visi Kalimantan Timur tahun 2030 untuk mendorong sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya terbarukan. Peningkatan kontribusi pada kelompok non pertambangan migas dan batubara menjadi indikasi *switching* ekonomi Kaltim sudah berjalan seperti tabel 3.2.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kelompok Sektor Tahun 2011 – 2015 (Triwulan I)

No	Kelompok	T A H U N				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Primer	9,94	7,97	2,65	0,50	-1,18
	Non Pertamb. Migas dan Batubara	5,60	6,85	4,80	4,66	5,53
	Pertamb. Migas dan Batubara	10,86	8,20	2,22	-0,36	-2,62
2	Sekunder	-1,49	-0,79	0,48	2,15	-5,86
	Non Industri Batubara dan Migas	3,89	8,34	6,09	4,40	4,12
	Industri Batubara dan Migas	-5,51	-8,27	-4,94	-0,28	-16,50
3	Tersier	10,05	7,81	6,81	7,24	5,43
	PDRB	6,47	5,48	2,72	2,02	-1,32

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Termasuk Kaltara)

* Angka pertumbuhan triwulan I/2015 (tahun per tahun)

Berdasarkan tabel 3.2 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan, dan bahkan pada triwulan I tahun 2015 mengalami kontraksi 1,32 persen. Hal ini disebabkan menurunnya kontribusi kelompok primer yaitu pertambangan migas dan batubara serta kelompok sekunder yaitu industri batubara dan migas.



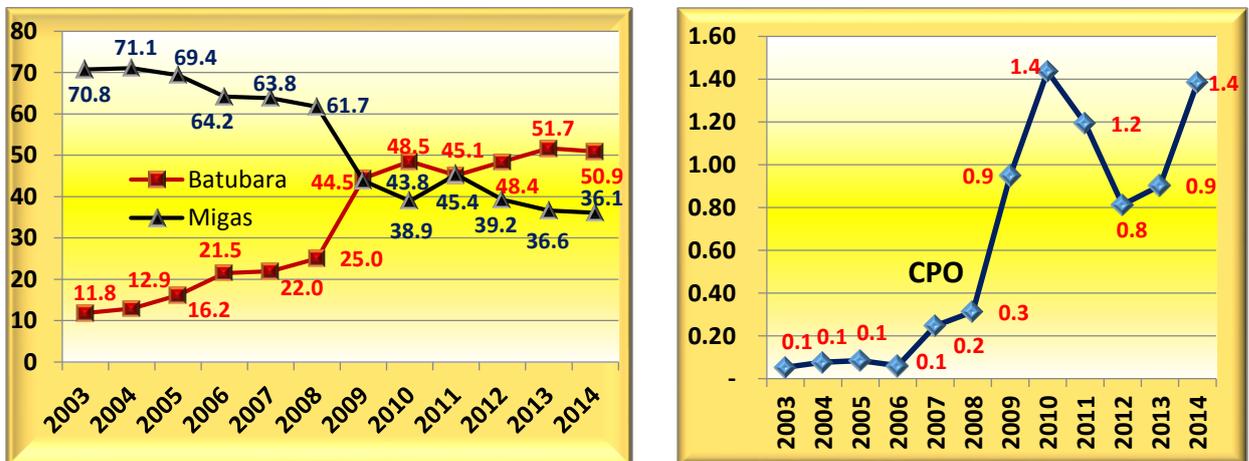
Namun pada kelompok primer non pertambangan migas dan batubara mengalami pertumbuhan positif mencapai 5,53 persen serta sumbangan dari kelompok sekunder non industri batubara dan migas sebesar 4,12 persen. Demikian juga kelompok sektor tersier masih dapat diandalkan memberikan sumbangan positif sebesar 5,43 persen. Kondisi ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai berhasil mendorong sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya terbarukan sebagai andalan perekonomian menggeser ketergantungan pada sumber daya alam tidak terbarukan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 - 2016

a). Ekonomi Global

Perekonomian Kalimantan Timur tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Indonesia maupun dunia. Hal ini mengingat bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah yang berbasis ekspor. Khususnya ekspor komoditas batubara dan migas. Kedua komoditas ini memberikan kontribusi terhadap ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2014 masing-masing 50,91 persen dan 36,10 persen seperti gambar 3.3.

Gambar 3.3
Grafik Kontribusi Nilai Ekspor Batubara, Migas dan CPO Terhadap Ekspor Total Kaltim (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Mengingat bahwa negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah negara Cina, India, Korea dan Jepang, maka kondisi perekonomian serta kebijakan import penggunaan migas dan batubara negara-negara tujuan ekspor tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap perekonomian Kaltim.

Perekonomian Jepang dan India pada tahun 2015 diperkirakan membaik, sebaliknya IMF memperkirakan perekonomian China pada 2015 – 2016 melambat dengan pertumbuhan di bawah 7 persen. Perekonomian ASEAN juga mengalami perlambatan.



Pada triwulan I/2015, Singapura tumbuh hanya 2,1 persen jauh dibawah pertumbuhan sebelumnya yang besarnya 4,9 persen. Kondisi ekonomi negara-negara tersebut akan memberikan dampak bagi Kaltim. Hal ini sudah terlihat dari harga batubara terus menurun hingga April 2015 seiring dengan permintaan yang terus menyusut terutama dari China dan India selaku importir batubara terbesar dari Kaltim. Penurunan harga juga disebabkan pasokannya diprediksi melimpah hingga dua tahun ke depan, serta kebijakan Pemerintah Tiongkok yang memproteksi industri batu bara domestik. Perekonomian provinsi yang ditopang batubara sepertinya akan suram ke depan jika hanya tetap mengandalkan komoditas tersebut.

CPO yang merupakan produk turunan dari Kelapa Sawit yang digadang akan menjadi pengganti ekonomi batubara dan migas di Kaltim, ternyata harganya melemah seiring dengan penguatan nilai tukar ringgit terhadap dolar AS yang signifikan pada triwulan I/2015, serta penerapan pajak ekspor sawit oleh Malaysia. Selain itu, permintaan yang tetap lemah (terutama dari Tiongkok) masih menjadi faktor penekan harga komoditi ini. Artinya bahwa perekonomian Kaltim juga menghadapi tantangan dari perkembangan harga CPO ini. Perlu diketahui bahwa produk CPO Kaltim mayoritas diekspor ke Malaysia, China dan India.

Adapun ekonomi global diperkirakan pada tahun 2015 dan 2016 membaik. Setelah tumbuh sebesar 2,6 persen pada 2014, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 3,3 persen pada tahun 2016.

b). Ekonomi Nasional

Pada triwulan I/2015 perekonomian Indonesia tumbuh di luar perkiraan beberapa lembaga yang ada. Beberapa lembaga seperti ADB, BI memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh berkisar 5 persen, nyatanya pada triwulan tersebut ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen. Angka ini sejalan dengan perkiraan Trading Economics yang memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh 4,66 persen, Kwik Kian Gie School of Business memperkirakan tumbuh 3,5 – 5 persen dan Bank Permata memperkirakan tumbuh di bawah 5 persen.

Meskipun demikian, masih ada harapan ekonomi Indonesia di tiga triwulan berikutnya tumbuh lebih baik sesuai perkiraan pemerintah yaitu 5,7 persen. Akan tetapi butuh kerja keras dari pemerintah agar target pertumbuhan tersebut dapat tercapai. Pada tahun 2016, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 6,4 – 6,6 persen. Pertumbuhan ini dapat dicapai jika mampu menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Upaya ke arah sana terus dilakukan pemerintah salah satunya menaikkan belanja infrastruktur dua kali lipat dari tahun 2015. Beberapa saran lain yang dapat mewujudkan pertumbuhan yang



diharapkan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi biaya logistik, dan memperkuat proses implementasi anggaran. Terkait pertumbuhan ini, ADB memberikan perkiraan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh 6 persen.

c) Ekonomi Kaltim

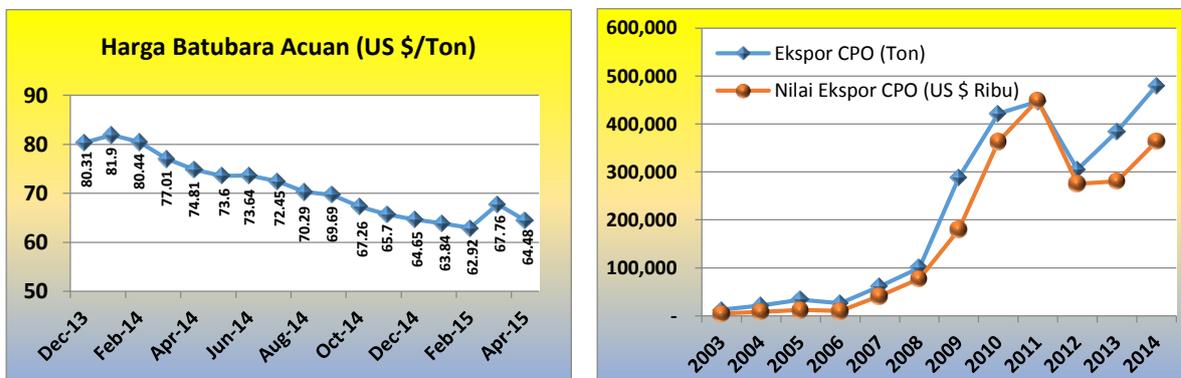
1. Pertumbuhan Ekonomi

Mengacu pada kondisi ekonomi Global dan negara-negara tujuan ekspor produk Kaltim serta mengacu pada kondisi ekonomi Nasional pada tahun 2015 dan 2016, maka dapat diperkirakan bagaimana kondisi perekonomian Kaltim pada tahun 2015 dan 2016. Harapannya tentu perekonomian Kaltim tetap membaik, meskipun untuk itu dibutuhkan upaya yang sangat berat. Karena sekitar 60 persen perekonomian Kaltim bergantung pada batubara dan migas, padahal kedua komoditas tersebut sedang menghadapi kelesuan.

Optimisme pemerintah pusat yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,4 – 6,6 persen pada tahun 2016 menjadi support bagi Kaltim. Pemerintah pusat tentu tidak sekedar memasang target tanpa dibarengi dengan upaya mewujudkan target tersebut. Upaya dan kebijakan pemerintah pusat inilah yang dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Kaltim nantinya.

Kendala terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah kondisi harga batubara di pasaran dunia. Data yang ada menunjukkan bahwa harga batubara acuan menurun sejak Desember 2013 hingga April 2015, meskipun pada Maret 2015 sempat mengalami kenaikan. Dengan asumsi ada perbaikan harga pada 2016 mengacu pada perbaikan ekonomi global, maka batubara mungkin masih mampu memberi andil positif pada perekonomian Kaltim 2016 seperti gambar 3.4.

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Harga Ekspor Batubara & CPO



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014



Perkembangan ekspor CPO baik volume maupun nilainya yang cukup signifikan diharapkan ikut membantu pertumbuhan ekonomi Kaltim. Meskipun jika dibandingkan dengan ekspor batubara dan migas masih kalah jauh, akan tetapi progres perkembangan ekspor CPO sangat menjanjikan bagi ekonomi Kaltim masa depan. Apalagi jika hasil CPO Kaltim sebagian dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri hilir, maka hal ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi ekonomi Kaltim. Sepertinya, perkembangan kelompok sektor di luar batubara dan migas pada tahun 2016 masih dapat menjadi tumpuan ekonomi Kaltim sebagaimana kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Dengan mengacu pada hal-hal di atas, maka perekonomian Kaltim pada tahun 2016 diperkirakan seperti tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2016 (%)

No	KELOMPOK	T A H U N		
		2014	2015	2016
1	Primer	0,50	-1,18	1,35
	Non Pertamb. Migas dan Batubara	4,66	5,53	5,50
	Pertamb. Migas dan Batubara	-0,36	-1,62	0,11
2	Sekunder	2,15	-5,86	0,47
	Non Industri Batubara dan Migas	4,40	4,12	5,38
	Industri Batubara dan Migas	-0,28	-16,50	-7,11
3	Tersier	7,24	5,43	6,83
	PDRB	2,02	-1,32	2,18

*Ket : 2014 angka realisasi; 2015 pertumbuhan y o n y triwulan I/2015
2016 angka perkiraan.*

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kaltim mengandalkan dari konsumsi pemerintah dan rumah tangga serta pembentukan modal tetap bruto. Di samping itu, ekspor juga diharapkan membaik dan berkontribusi positif pada perekonomian Kaltim.

2. Inflasi

Inflasi merupakan gambaran perubahan harga suatu wilayah yang dilihat dari sisi konsumennya. Inflasi dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menggambarkan perekonomian secara mikro suatu wilayah dengan memperhatikan perubahan harga dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari-Desember 2014, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 7,66 persen (tahun kalender 2014). Inflasi kumulatif selama tahun 2014 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yaitu sebesar 9,65 persen. Jika dilihat dari 3 kota pembentuk inflasi di Provinsi



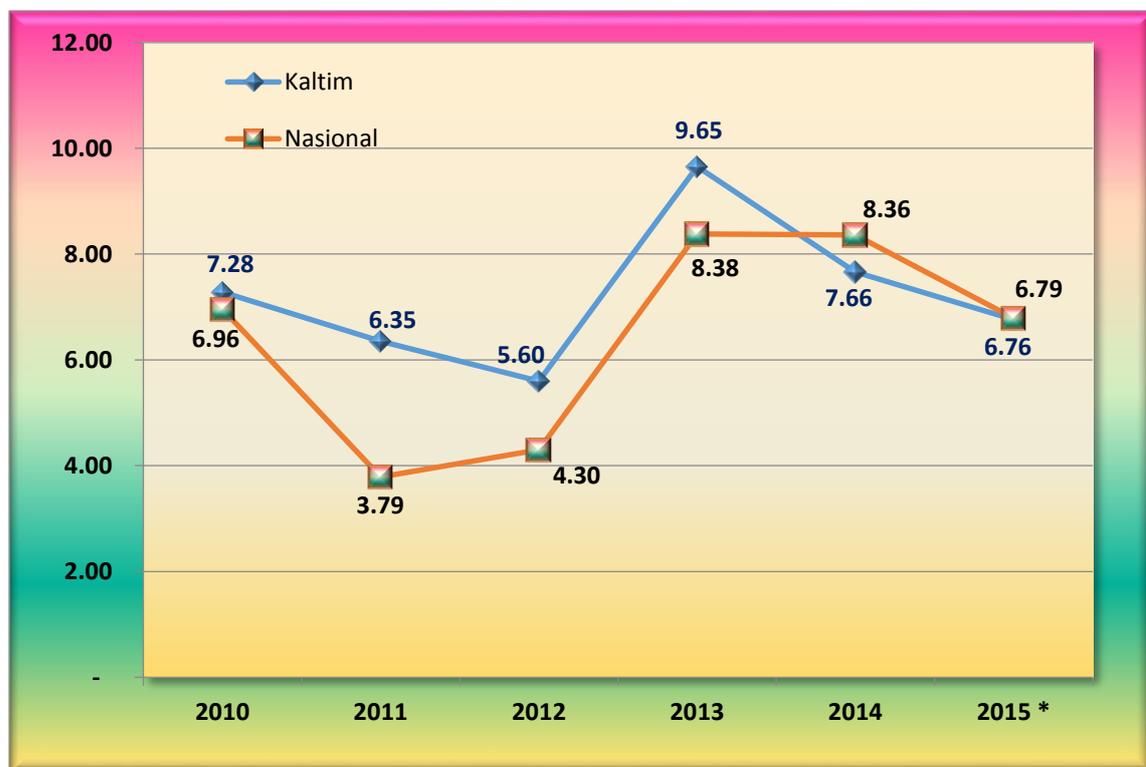
Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan, masing-masing mengalami inflasi sebesar 6,74 persen; 7,43 persen; dan 11,91 persen.

Perkembangan inflasi pada 2014 dan 2015 (hingga April 2015) sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada dua tahun tersebut inflasi Kaltim di bawah angka nasional. Pada tahun 2014 inflasi Kaltim 7,66 persen sedangkan nasional 8,36 persen. Pada April 2015, inflasi year on year Kaltim sebesar 6,76 persen sedangkan nasional 6,79 persen. Ini dapat dimaknai bahwa Kaltim mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional.

Dengan kondisi tersebut, diharapkan kebijakan pengendalian inflasi masih dapat terus dijaga sehingga selama periode 2015 inflasi Kaltim tetap di bawah nasional. Target nasional untuk mencapai inflasi 5 persen pada tahun 2015 yang dibarengi dengan kebijakan untuk mencapai target tersebut diharapkan berdampak pada Kaltim, sehingga inflasi Kaltim terjaga.

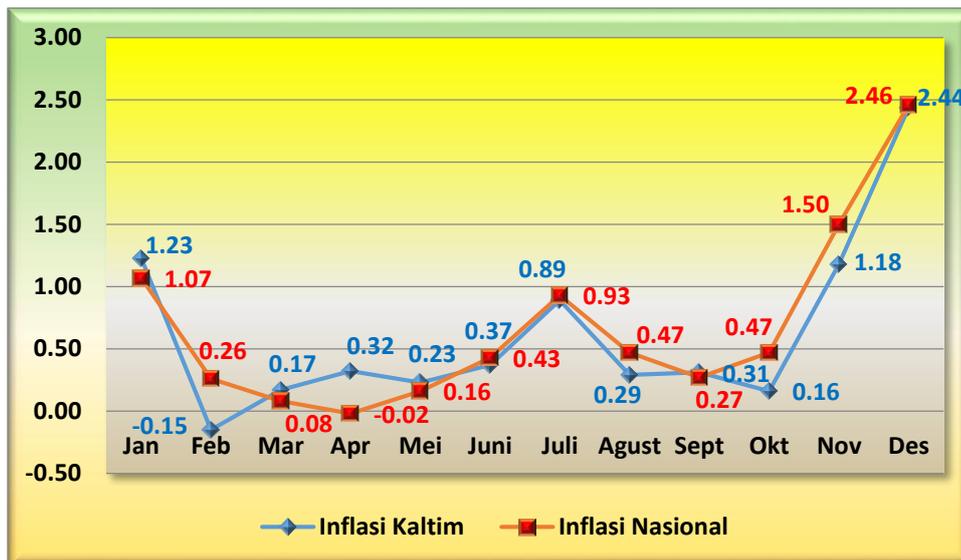
Pada tahun 2016, nasional menargetkan inflasi sebesar 4,0 persen. Sebuah target yang sangat optimis. Bagi Kaltim, melihat track perjalanan angka inflasi yang ada, seperti target 5 – 6 persen masih realistis untuk dicapai pada tahun 2016 seperti gambar 3.5.

Gambar 3.5
Grafik Perkembangan Inflasi Kaltim dan Nasional (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Gambar. 3.6
Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Desember 2013 – Desember 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2014 memiliki trend yang hampir sama dengan inflasi level nasional. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2014, hanya pada bulan february mengalami deflasi sebesar -0,15 persen, sedangkan sebelas bulan lainnya mengalami inflasi dengan capaian tertinggi pada bulan Desember sebesar 2,44 persen. Ekstrimnya inflasi pada bulan-bulan terakhir tahun 2014 ini dipicu karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi hampir di semua harga kebutuhan pokok masyarakat Nasional.

Selama tahun 2014, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan nilai inflasi paling besar berada pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi yang mencapai 12,27 persen dan diikuti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (7,29%) serta perumahan (7,13%). Sedangkan inflasi terendah berada pada kelompok pengeluaran sandang yang hanya mencapai 3,39 persen selama periode tahun 2014 seperti tabel 3.4.



Tabel. 3.4
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2014
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2014	Inflasi Tahun Kalender			
		Kaltim	Samarinda	Balikpapan	Tarakan
UMUM	120,53	7,66	6,74	7,43	11,91
1. Bahan Makanan	122,67	6,76	4,47	7,24	14,09
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	124,20	7,29	7,26	6,17	10,71
3. Perumahan	117,83	7,13	7,17	6,48	8,87
4. Sandang	107,53	3,39	3,20	0,99	11,09
5. Kesehatan	116,64	6,48	4,56	7,04	12,23
6. Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga	116,79	6,10	3,87	7,92	9,64
7. Transportasi & Komunikasi	125,88	12,27	11,06	12,11	17,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

Dengan mengacu pada data dan analisa diatas, maka tingkat inflasi di Kaltim pada tahun 2015 dan 2016, diperkirakan 5 ± 1 %.

3. Kemiskinan

Selama kurun waktu setahun dari 2013-2014 (kondisi bulan maret), telah terjadi kenaikan angka kemiskinan baik secara absolut maupun persentasenya dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 237.960 jiwa kemudian meningkat menjadi 253.600 jiwa pada tahun 2014. Demikian pula angka kemiskinan yang meningkat menjadi 6,42 persen pada tahun 2014 dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan hanya sebesar 6,06 persen.

Jika dilihat dari klasifikasi wilayah administrasinya, jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode Maret 2013 - Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 7.470 ribu orang sedangkan di daerah pedesaan juga meningkat sebanyak 8.170 ribu orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini juga terlihat pada persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan



Maret 2014 sebesar 10,33 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,01 persen seperti tabel 3.5.

Tabel. 3.5.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur
Menurut Daerah, Maret 2013 – Maret 2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Maret 2013	90,42	147,54	237,96	3,71	9,90	6,06
Maret 2014	97,89	155,71	253,60	4,01	10,33	6,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Garis kemiskinan merupakan suatu batasan pengeluaran per kapita penduduk dimana jika berada di bawah batasan tersebut maka penduduk dianggap memasuki kuadran miskin (tergolong penduduk miskin), begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan pada wilayah tersebut.

Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada maret 2014 mencapai Rp. 431.560,- dengan jumlah penduduk miskin mencapai 253.600 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 253.600 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengeluaran tidak lebih dari Rp. 431.560,- dalam waktu sebulan. Garis kemiskinan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013 di bulan yang sama dan peningkatannya mencapai 13,06 persen. Peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi ini berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. Jika memperhatikan komponen garis kemiskinan, maka garis kemiskinan makanan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, maupun kesehatan).

Jika dilihat dari administratif wilayah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan dengan garis kemiskinan pada bulan Maret 2014 di daerah perkotaan sebesar Rp 448.220,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 404.554,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan seperti tabel 3.6.



Tabel. 3.6.
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2014

Wilayah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2013	285.303	115.829	401.132	90,42	3,71
Maret 2014	314.344	133.876	448.220	97,89	4,01
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2013	261.242	88.694	349.935	147,54	9,90
Maret 2014	301.084	103.470	404.554	155,71	10,33
<u>Kota+Desa</u>					
Maret 2013	276.173	105.533	381.706	237,96	6,06
Maret 2014	309.285	122.275	431.560	253,60	6,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014

Analisis kemiskinan memiliki berbagai kajian variable berdasarkan survei sosial ekonomi nasional. Selain jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, analisis terkait kemiskinan suatu wilayah harus memperhatikan tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan penurunan kemiskinan dengan meminimalisir kedalaman dan keparahan kemiskinan agar permasalahan kemiskinan tidak terus mengakar.

Pada periode Maret tahun 2013 hingga Maret tahun 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0,828 pada keadaan Maret 2013 menjadi 1,077 pada keadaan Maret 2014. Demikian juga Indeks Keparahannya Kemiskinan meningkat dari 0,188 menjadi 0,279 pada periode yang sama.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Pada bulan Maret 2014, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya sebesar 0,703 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,683. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,188 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,427. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di daerah perdesaan baik dari segi kualitas kemiskinan maupun kesenjangan antar penduduk miskin lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti tabel 3.7.



Tabel. 3.7.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</u>			
Maret 2013	0,421	1,495	0,828
Maret 2014	0,703	1,683	1,077
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</u>			
Maret 2013	0,104	0,325	0,188
Maret 2014	0,188	0,427	0,279

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2014



Tabel. 3.8.
Indikator Ekonomi Regional Makro Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.028.487	3.131.964	3.216.101	3.300.517	3.351.400
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010)	%	-	6,47	5,48	2,72	2,02
3.	Laju Inflasi	%	7,28	6,35	5,60	9,65	7,66
4.	Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000)	Juta Rp	37,28	44,62	48,30	47,52	-
5	Persentase penduduk miskin (Kondisi Maret)	%	7,66	6,77	6,68	6,06	6,42
6 .	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	749.360	871.251	986.563	1.096.708	-
6.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	363.367	403.719	450.920	508.706	-
6.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	385.993	467.532	535.643	588.003	-
7.	PDRB per kapita (Th.Dasar 2010)	Juta Rp	116,95	140,23	146,00	147,59	145,86
8.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	Juta Rp	8.869.999,93	15.638.335,23	10.046.477,40	33.096.712,70	38.469.903,40

Sumber : data diolah



3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD.

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.9, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum bahwa Meskipun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai 13,7 persen, namun realisasi pendapatan daerah tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh penurunan hampir di seluruh unsur-unsur pendapatan daerah kecuali DAU dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat yang peningkatannya tidak signifikan. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sector pertambangan dan penggalan yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23.3%. Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir, semua unsur PAD yang menunjukkan peningkatannya yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun pada tahun terakhir semua unsur pembentuk PAD tersebut mengalami penurunan 439,37 milyar rupiah. Peningkatan unsur PAD selama lima tahun terakhir ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan. Hal ini terjadi khususnya pada pajak daerah yang merupakan unsur dominan yang mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap PAD sekaligus menjadi indikasi tumbuhnya perekonomian daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 berada pada kisaran 38,5 persen sampai dengan 51,6 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang.

Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,1 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur dana bagi hasil pajak/dan bukan pajak dan DAK yang juga



cenderung meningkat meskipun pada tahun terakhir terjadi penurunan. Sedangkan unsur lainnya yaitu DAU terjadi penurunan rata-rata sebesar-38,8 persen.

Kenaikan dana bagi hasil pajak/dan bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang di bagi hasilkan kepada daerah. Sedangkan menurunnya DAU disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula DAU secara murni oleh Pemerintah Pusat. Sehingga Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan DAU yang semakin kecil karena secara menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kapasitas fiskal yang cenderung lebih besar dari kebutuhan fiskalnya. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).

Secara totalisas realisasi anggaran dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya sebesar 566,2 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat dari 0,3 persen tahun 2010 menjadi 3,3 persen pada tahun 2014. Meskipun begitu, secara spesifik unsur hibah dari Pemerintah dan unsur hibah dari kelompok masyarakat cenderung menurun seperti tabel 3.9.



Tabel 3.9
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Pendapatan Daerah	7.041.041	9.819.130	11.904.245	11.631.697	11.192.326	13.7%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.711.299	4.503.239	5.409.949	5.885.262	5.771.202	23.3%
1.1	Pajak Daerah	2.023.934	3.679.367	4.486.404	4.929.791	4.887.846	28.1%
1.2	Retribusi Daerah	10.787	13.699	22.496	33.677	11.951	19.1%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	137.612	215.653	207.749	291.684	267.705	21.3%
1.4	Lain-lain PAD yang sah	538.966	594.520	692.755	630.110	613.699	3.8%
2	Dana Perimbangan	4.308.465	5.298.980	6.089.861	5.335.760	5.053.998	5.1%
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	4.274.657	5.206.241	5.984.332	5.272.172	4.953.302	4.9%
2.2	DAU	-	51.447	52.638	55.540	57.312	3.7%
2.3	DAK	33.643	38.188	34.616	8.048	1.384	-38.8%
2.4	Dana Penyesuaian	165	-	-	-	-	
2.5	Dana Insentif Daerah	-	3.104	18.275	-	-	
3	Lain-Lain PAD yang sah	21.277	16.911	404.935	410.675	367.126	566.2%
3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	927	329	-	-	-	
3.2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	11.200	886	12.891	14.044	15.495	320.5%
3.3	Dana Penyesuaian	-	-	389.643	394.631	351.631	-4.8%
3.4	Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	



No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak Ketiga	9.150	-	-	-		
3.6	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	15.696	2.401	2.000		

Sumber : data diolah

**3.2.1.2. Belanja Daerah**

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi realisasi penggunaan belanja daerah dapat dilihat seperti tabel 3.10.

Tabel. 3.10
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.157.121	4.679.991	6.126.151	7.103.434	6.598.286	22,1%
5.1.1	Belanja Pegawai	625.651	697.747	765.957	779.583	1.027.980	13,7%
5.1.4	Belanja Hibah	356.170	683.778	856.807	1.567.764	946.892	40,2%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	103.863	130.813	7.074	3.940	5.500	-18,3%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	901.355	1.863.897	2.132.835	2.692.808	2.576.756	35,8%
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.170.082	1.303.593	2.354.897	2.059.339	2.031.159	19,5%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	165	8.581	-	10.000	2.574%
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.761.447	3.462.844	5.213.614	6.676.811	5.619.397	22,1%
5.2.1	Belanja Pegawai	252.541	279.926	493.003	568.036	490.278	22,1%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	854.936	1.406.715	2.221.478	2.457.693	2.418.455	32,9%
5.2.3	Belanja Modal	1.653.970	1.776.203	2.499.133	3.651.082	2.710.664	17,1%
Jumlah Belanja		5.918.568	8.142.835	11.339.765	13.780.245	12.217.683	21,8%
Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)		53,34	57,47	54,02	51,55	54,01	
Proporsi Belanja Langsung (%)		46,66	42,53	45,98	48,45	45,99	

Sumber : Data Diolah



Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2014 terjadi penurunan belanja. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 54,01 persen pada tahun 2014 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Secara umum, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sama dengan realisasi belanja langsung yang mencapai 22,10 persen selama lima tahun terakhir. Namun yang perlu digaris bawahi adalah belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan besaran belanja dari tahun ke tahun (bahkan rata-rata pertumbuhannya mencapai -18,3%).

Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi seperti tabel 3.11.

Tabel. 3.11
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (dalam juta rupiah)

No	TAHUN	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2010	1.201.873	5.918.568	20.31%
2	2011	1.270.750	8.142.835	15.61%
3	2012	1.514.854	11.339.765	13.36%
4	2013	1.696.672	12.900.000	13.15%
5	2014	1.587.234	12.217.683	12.99%

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel 3.11 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 20,31 persen hingga 12,79 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan parasarana dasar kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.



Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.12. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2010-2014 dapat dijelaskan dan dilihat seperti tabel 3.12.

1. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2010-2014 adalah sebesar 22,6 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
2. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 29 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat. Terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan juga meningkat baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.
3. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung adalah sebesar 15,2 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang
Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PERTUMBUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Belanja Tidak Langsung	16.426.445	2.472.776	2.782.161	3.063.571	3,807,431	29,0 %
1	Gaji dan Tunjangan	282.687	321.603	345.849	465.048	467,878	24,3 %
2	Tambahan Penghasilan PNS	268.718	274.906	290.737	323.347	354,834	7,3 %
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.685	12.370	12.740	13.621	15,268	12,4 %
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.upaten /Kota dan Pemerintah Desa	901.355	1.863.897	2.132.835	2.261.555	2,779,451	37,5 %



B.	Belanja Langsung	33.204	37.833	50.749	48.227	86,978	15,2 %
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis	-	-		-	-	
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	23.257	26.492	35.818	28.695	37,765	10,9 %
7	Belanja Jasa Kantor	9.947	11.341	14.931	19.532	23,914	24,8 %
	- Belanja Air	3.853	4.412	5.283	4.645	4,914	7,0 %
	- Belanja Listrik	4.033	3.540	4.445	5.302	6,281	12,8 %
	- Belanja Surat Prov.ar / Majalah	1.491	2.591	3.145	3.485	4,336	32,6 %
	- Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	569	798	2.059	6.100	14,105	131,4 %
	- Belanja Sewa Gedung	-	-	-	-	-	-
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-	-	-	-	-
C.	Pembiayaan pengeluaran	-	-	-	-	-	-
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
Total		1.505.595	2.521.950	2.847.842	3.111.798	3.174.410	22,6 %

Sumber : Data Diolah

3.2.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran seperti tabel 3.13.



Tabel 3.13
Defisit Riil Anggaran (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
1.	Pendapatan	7.041.041	9.819.129	11.904.745	11.631.697	11.192.326	13,7%
	Dikurangi Realisasi:						
2.	Belanja Daerah	5.918.568	8.142.835	11.339.765	13.780.245	12.217.683	21,3%
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	274.756	491.006	202.800	-	25.000	-18,2
	DEFISIT RIIL (REALISASI)	847.717	1.185.289	361.680	(2.148.548)	(1.050.357)	-258%

Sumber : Data Diolah

Dari data tabel 3.13 di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya seperti tabel 3.14.

Tabel. 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.652.437	2.837.724	3.198.904	1.050.356	800.000	-1.60 %
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	1.652.437	2.837.724	3.198.904	1.050.356	800.000	-1.60 %
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-

Sumber :Data Diolah



SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2010-2014 terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar -1,6 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efektifitas penggunaan anggaran terutama pada dua tahun terakhir yang sisa lebih penghitungan anggarannya menurun cukup drastis.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2016 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2010-2014). maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal.

3.2.2.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi. inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. PAD terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang



dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan. Untuk Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus,

Pendapatan Daerah tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 8.980.841.500.000, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.445.098.200.000, (60,63%) Dana Perimbangan sebesar Rp. 3.168.541.900.000,(35,28 %) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 367.201.400.000, (4,09%) seperti tabel 3.15.

Tabel. 3.15
Target Pendapatan 2015 dan Rencana Tahun 2016 serta Proyeksi Tahun 2017

URAIAN	TARGET		
	Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	8.536.213.350.000	8.980.841.500.000	8.885.343.000.000
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.545.993.570.000	5.445.098.200.000	5.523.126.000.000
I. Pajak Daerah	4.669.869.000.000	4.478.780.000.000	4.626.517.200.000
a. Pajak Kendaraan Bermotor	745.730.000.000	735.000.000.000	771.750.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.078.060.000.000	905.000.000.000	1.060.900.000.000
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.691.148.000.000	2.700.000.000.000	2.652.250.000.000
d. Pajak Air Permukaan	6.579.000.000	6.180.000.000	6.365.200.000
e. Pajak Rokok	148.352.000.000	132.600.000.000	135.252.000.000
II. Retribusi Daerah	12.204.020.000	12.096.200.000	12.339.000.000
a. Retribusi Jasa Umum	5.797.800.000	5.877.500.000	5.995.000.000
b. Retribusi Jasa Usaha	6.220.160.000	6.049.400.000	6.170.000.000
c. Retribusi Perizinan Tertentu	186.060.000	169.300.000	173.400.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	281.184.550.000	289.811.500.000	298.506.400.000
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	582.736.000.000	664.410.500.000	585.763.400.000
B. DANA PERIMBANGAN	2.624.018.350.000	3.168.541.900.000	2.994.516.000.000
I. Bagi Hasil Pajak	668.000.000.000	673.000.000.000	678.000.000.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	290.000.000.000	295.000.000.000	300.000.000.000
b. Bagi Hasil Pajak PPh PsI 21.25.29	378.000.000.000	378.000.000.000	378.000.000.000



URAIAN	TARGET		
	Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.890.054.485.000	2.495.541.900.000	2.257.820.500.000
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.482.485.000	13.615.200.000	13.535.700.000
b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
c. Landrent	9.383.000.000	8.101.600.000	8.101.800.000
d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti)	554.400.000.000	692.583.900.000	615.600.000.000
e. Minyak Bumi	410.370.000.000	514.645.500.000	483.767.000.000
f. Gas Bumi	899.919.000.000	1.265.095.700.000	1.135.316.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya	65.963.865.000	-	58.696.000.000
a. Dana Alokasi Umum	57.312.515.000	-	57.313.000.000
b. Dana Alokasi Khusus	8.651.350.000	-	1.384.000.000
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	366.201.430.000	367.201.400.000	367.701.000.000
I. Pendapatan Hibah	14.570.000.000	15.570.000.000	16.070.000.000
II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus	351.631.430.000	351.631.400.000	351.631.000.000

Sumber : Data Diolah

3.2.2.2. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan PNS serta gaji dan tunjangan anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Belanja wajib dan mengikat adalah belanja yang harus dipenuhi sebagai kewajiban daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rencana belanja wajib dan mengikat di 2016 sebesar Rp.3.480.570.000.000, sedangkan proyeksi tahun 2017 naik menjadi Rp.3.595.699.000.000, dilihat dari tabel 3.16.



Tabel. 3.16
Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2015, Rencana Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017

No	Uraian	Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.	Belanja Tidak Langsung	3.522.037.392.026	3.229.871.000.000	3.311.750.000.000
	Gaji dan Tunjangan	901.886.507.270	501.561.000.000	557.400.000.000
	Tambahan Penghasilan PNS	149.279.922.730	445.300.000.000	445.300.000.000
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.936.752.026	13.877.000.000	14.007.000.000
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.461.934.210.000	2.269.133.000.000	2.295.053.000.000
2.	Belanja Langsung	222.167.000.000	250.699.000.000	283.938.000.000
	Belanja Honorarium PNS Khusus Guru dan Tenaga Medis	72.626.000.000	76.258.000.000	80.070.000.000
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar PNS	28.824.000.000	31.707.000.000	34.877.000.000
	Belanja Jasa Kantor	96.411.000.000	112.352.000.000	131.014.000.000
	- Belanja Air	6.631.000.000	7.453.000.000	8.377.000.000
	- Belanja Listrik	41.527.000.000	49.233.000.000	58.370.000.000
	- Belanja Surat Kabar/Majalah	4.135.000.000	5.176.000.000	6.480.000.000
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.220.000.000	9.207.000.000	10.312.000.000
	- Belanja Sewa Gedung	35.898.000.000	41.283.000.000	47.475.000.000
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	24.306.000.000	30.382.000.000	37.978.000.000
3.	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
	Total	3.744.204.392.026	3.480.570.000.000	3.595.699.000.000

Sumber : Data Diolah

**3.2.2.3 . Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan**

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2016 mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2016 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, regional serta ekonomi global yang sedang terjadi guncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional.

Pendapatan daerah sebesar Rp 8.980.841.500.000, diperkirakan dibelanjakan sebesar Rp. 3.480.570.000.000 untuk Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran serta proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.248.271.500.000, seperti tabel 3.17.

Tabel. 3.17
Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2015, Rencana Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017

No	Uraian	Target		
		Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017
1.	Pendapatan	8.536.213.350.000	8.980.841.500.000	8.885.343.000.000
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	800.000.000.000	750.000.000.000	600.000.000.000
	Total Penerimaan	9.336.213.350.000	9.730.831.500.000	9.485.343.000.000
	Dikurangi			
4.	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	3.744.204.392.026	3.480.570.000.000	3.595.699.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	5.952.008.957.974	6.248.271.500.000	5.889.645.000.000

Sumber: data diolah

**3.2.2.4 . Proyeksi Belanja**

Rencana belanja tahun 2016 diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah.

Adapun rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebesar Rp. 9.630.841.500.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.275.501.500.000 (44.39 %) dan Belanja Langsung 5.355.340.000.000 (55.61 %), selanjutnya dapat dilihat tabel 3.18.

Tabel. 3.18**Struktur Belanja Tahun 2015 dan Rencana Tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017**

Uraian		Jumlah		
		Penetapan Tahun 2015	Rencana Tahun 2016	Rencana Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan	8.536.213.350.000	8.980.841.500.000	8.885.343.000.000
2	Belanja	9.336.213.350.000	9.630.841.500.000	9.385.343.000.000
2.1.	Belanja tidak langsung	5.406.872.865.000	4.275.501.500.000	3.900.724.400.000
	2.1.1. Belanja Pegawai.	1.051.166.430.000	1.034.747.500.000	1.016.707.000.000
	2.1.2. Belanja Subsidi	-	-	-
	2.1.3. Belanja Hibah.	610.966.430.000	300.000.000.000	100.000.000.000
	2.1.4. Belanja Sosial	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
	2.1.5. Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota	2.461.934.205.000	2.269.133.000.000	2.295.053.000.000
	2.1.6. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota	1.259.305.800.000	646.121.000.000	463.464.400.000
	2.1.7. Belanja Tak Terduga	18.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	3.929.340.485.000	5.355.340.000.000	5.484.618.600.000
	2.2.1. Belanja Pegawai	360.779.591.364	401.450.458.954	400.303.306.080
	2.2.2. Belanja barang dan Jasa	1.824.495.618.318	2.620.313.403.244	2.048.200.406.080
	2.2.3. Belanja Modal	1.744.065.275.318	2.333.576.137.802	3.036.114.887.840
	Surplus / Defisit	(800.000.000.000)	(650.000.000.000)	(500.000.000.000)

Sumber : Data diolah

**3.2.2.5 . Proyeksi Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun yang akan datang. Penerapan anggaran defisit dalam RKPD tahun 2016 sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam APBD. Adapun defisit anggaran sebesar Rp. 650 milyar, melalui sumber Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 750 milyar, selanjutnya Rp. 100 milyar dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggaran 2014, seperti tabel 3.19.

Tabel. 3.19
Proyeksi Pembiayaan Tahun 2015-2016 Prov. Kalimantan Timur

No	Uraian	Jumlah		
		Penetapan Tahun 2015 (Rp)	Rencana RPJMD Tahun 2016 (Rp)	Proyeksi RPJMD Tahun 2017 (Rp)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	800.000.000.000	750.000.000.000	600.000.000.000
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	800.000.000.000	750.000.000.000	600.000.000.000
2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian - Pinjaman	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	100.000.000.000	100.000.000.000
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	100.000.000.000	100.000.000.000
3.	Pembayaran pokok utang	-	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	800.000.000.000	650.000.000.000	500.000.000.000



3.2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kinerja ekonomi yang positif selain kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak mudah, karena tidak terlepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, Pemerintah Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Secara umum arah kebijakan untuk pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam ekstensifikasi meliputi:

1. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)
 - a. Menjamin kepastian hukum.
 - b. Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*)
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
 - b. Meningkatkan pelayanan.
 - c. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2016, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain :

1. Bidang Pajak Daerah.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan ;

- a) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kaltim khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
- b) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama didaerah pesisir dan daerah perbatasan.
- c) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
- d) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
- e) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- f) Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (BanKaltim) sampai ke tingkat pedesaan.
- g) Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor *Delivery Order*.
- h) Menyediakan mobil Samsat Kampus hasil kerjasama yang dilakukan antara Dispenda dengan Universitas Mulawarman.
- i) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
- j) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
- k) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
- l) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kaltim.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan :

- a) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
- b) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing.



- c) Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kaltim.
 - d) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kaltim untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
 - e) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum.
 - f) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kaltim khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - g) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.
 - h) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - i) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kaltim.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan :
- a) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011.
 - b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kaltim wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - d) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kaltim.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan kebijakan :
- a) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.



2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan :
 - a. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
 - b. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyeteroran.
 - c. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
 - e. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
 - f. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

3.2.3.2 . Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program-program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 119 prioritas pembangunan Tahun 2015.



8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kalimantan Timur tahun 2016, akan meliputi :

1. Peningkatan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) upaya kuratif dan 2/3 (dua per tiga) upaya preventif;
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dengan Peningkatan kualitas tenaga kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor UMKM, memperbaiki tata niaga dan pemasaran produk UMKM dan pengarusutamaan gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga;
6. Percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi Sumber Daya mineral, gas, dan batubara;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi;
8. Pengembangan Agribisnis dengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas infrastruktur dasar menuju sentra agribisnis, penyediaan SDM pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis;
9. Peningkatan produksi pangan dengan meningkatkan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, serta peningkatan konektivitas antar kawasan industri dengan pusat pertumbuhan;
11. Reformasi birokrasi dan layanan publik dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan



12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penurunan emisi gas rumah kaca, Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan yang terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkungan.

3.2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Untuk lebih mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau yang disebut dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah, serta dengan keberadaan jumlah perusahaan Internasional maupun nasional yang cukup banyak, maka potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya.